



KESEHATAN

Sebagian PBI Akan Dibiayai oleh APBD

SLEMAN - Sebanyak 11.196 jiwa penerima bantuan iuran (PBI) jaminan kesehatan yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dihapus. Sebagian akan dialihkan melalui pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).



DELIMA PURNEMASARI/RADAR JOGJA

LUDIYANTA

Kepala Bidang
Perlindungan Jaminan
Sosial Dinsos Sleman

Ludyanta menjelaskan, pengalihan tersebut memungkinkan asalkan sesuai kriteria. Hal ini diatur dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 10.1 Tahun 2020. "Untuk anggaran masih memungkinkan, jadi bisa," katanya saat ditemui kemarin (24/2).

Pengalihan ini utamanya adalah untuk mereka yang peran dan tugasnya bisa mendapatkan penghargaan. Misalnya, guru, taruna siaga bencana (Tanaga), dan pekerja sosial masyarakat (PSM).

"Pekerjaan yang mendapat honor dari APBN ataupun APBD dihapus," katanya.

Ludyanta menjelaskan, meski honor di bawah upah minimum atau termasuk golongan tidak mampu memang tetap dihapus. Dia mencontohkan Tagana yang hanya dapat tali asih Rp 250 ribu setiap bulannya.

Sementara itu, Staf Pengelola Data Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Sleman Atmoko menjelaskan, ada beberapa kategori dalam penghapusan PBI ini. Terdapat 1.086 NIK yang tidak ditemukan. Umumnya angka ini didapat dari hasil sanding dengan data Kemendagri.

"Datanya tidak ada dalam catatan sipil jadi dihapus," katanya.

Selanjutnya ada 752 jiwa yang meninggal. Sebanyak 689 jiwa yang pindah segmen, yakni mereka yang iurannya kini telah dibiayai oleh perusahaan.

Lalu ada 149 jiwa yang datanya ganda. Berarti satu orang memiliki dua atau lebih NIK. Ada pula 608 jiwa yang pekerjaannya tidak sesuai, yakni mereka yang digaji APBN atau APBD tadi.

Terbanyak, ada 7.912 yang dihapuskan. Atmoko menilai utamanya karena adanya bantuan yang tidak tepat sasaran.

"Penghapusan ini dari pemerintah pusat. Kebijakan tiap waktu tentu bisa berubah," tambahnya. (del/eno/by)